



KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN KETUA DPR-RI
PADA ACARA PRESS GATHERING
Di Wisma Griya Sabha Kopo, 12 Desember 2009

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

- *Yang saya hormati Para Anggota DPR-RI yang berkenan hadir pada pagi hari ini*
- *Sekretaris jenderal DPR-RI*
- *Rekan-rekan wartawan, baik media cetak maupun elektronik.*

Pertama-tama marilah kita persembahkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa atas berkah, rahmat, dan hidayah-Nya, pada hari yang berbahagia ini, kita dipertemukan di dalam forum **Press Gathering** ini dalam keadaan sehat wal afiat. Saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada semua peserta **Press**

Gathering yang berasal dari berbagai media, baik media cetak maupun elektronik.

Peserta Pers Gathering yang kami banggakan,

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terimakasih kepada insan pers yang secara terus menerus tanpa kenal lelah mempublikasikan hasil-hasil sidang maupun peristiwa-peristiwa lain yang terjadi di DPR. Saya melihat, peran pers begitu besar. Tanpa pers, masyarakat akan sulit mendapatkan informasi tentang keputusan-keputusan DPR yang terkait langsung dengan kepentingan masyarakat.

DPR dan Pers, sebenarnya mempunyai peran yang sama, yaitu mengawal berlangsungnya demokrasi di negeri tercinta ini. Adanya Lembaga Legislatif dan Lembaga Pers, merupakan syarat berjalannya sebuah demokrasi yang baik. Sebuah negara telah melakukan praktek demokrasi yang baik apabila Warga masyarakatnya dapat menikmati hak dasar, seperti menyatakan pendapat (*freedom for expression*), berkumpul dan berserikat (*freedom for assembly*), dan hak menikmati pers yang bebas (*freedom for the press*). Melihat peran pers yang begitu besar, lembaga pers bahkan seringkali disebut sebagai pilar keempat demokrasi (*the fourth estate*)

setelah lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jadi, DPR sebagai Lembaga Legislatif yang mengemban aspirasi rakyat dan Media Massa sebagai lembaga yang mempunyai loyalitas kepada rakyat, keduanya mempunyai tujuan yang sama.

Pasal 6 UU Pers menegaskan bahwa pers nasional melaksanakan peran memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Sebagai lembaga yang mengemban aspirasi rakyat, kami berharap terciptanya keseimbangan informasi yang diserap oleh masyarakat tentang apa yang telah kami lakukan di Lembaga Perwakilan Rakyat.

Meski demikian, kami juga menyadari bahwa hal ini tidak mudah dipenuhi oleh rekan-rekan wartawan, sebab kadangkala wartawan juga menghadapi tuntutan lain disamping tugas mulianya membela kepentingan masyarakat. Tuntutan itu tidak terlepas dari kepentingan media sebagai

lembaga profit, yang mau tidak mau, media harus menyajikan sesuatu yang memiliki nilai jual.

Posisi dilematis ini dapat kami pahami, terlebih persaingan media di Indonesia sudah sangat ketat, sehingga pekerja-pekerja media dituntut untuk memberikan yang terbaik bagi pemirsa maupun pembacanya. Namun kami percaya, lembaga pers mampu bersikap profesional dalam bekerja, menyampaikan informasi yang benar, akurat, dan seimbang kepada masyarakat.

Rekan-rekan jurnalis yang saya banggakan,

Dinamika politik di Indonesia terus berkembang. Sistem pemilihan anggota legislatif maupun Pemilihan Presiden (Pilpres) yang berubah, membawa dampak pada tuntutan masyarakat terhadap figur yang dipilihnya. Demikian juga sebaliknya, para wakil maupun pemimpin yang mereka pilih, lebih memiliki ikatan emosional dan tanggungjawab terhadap konstituennya. Konstituen merasa mempunyai hak menuntut kinerja wakilnya karena dipilih langsung. Karena itu, setiap saat, dan apapun yang dilakukan wakilnya di Parlemen, selalu ingin diketahui masyarakat.

Kondisi politik saat ini membuat seluruh komponen bangsa meletakkan harapannya pada DPR untuk dapat menciptakan sistem politik yang ideal, yaitu sistem politik yang dapat merespon dan menjawab serta ikut menyelesaikan masalah-masalah bangsa melalui tugas dan fungsinya, yaitu fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. Apalagi, di awal masa tugasnya, anggota DPR-RI periode 2009-2014 ini langsung dihadapkan pada persoalan-persoalan besar. Mereka diuji untuk mampu menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini.

Anggota Dewan, baik melalui fraksi maupun perorangan, berupaya menjawab tuntutan masyarakat dengan menawarkan solusi-solusi, baik melalui persidangan, statemen di koran, maupun tulisan-tulisan di berbagai media. Dengan demikian, tanggungjawab informasi, baik dari masyarakat maupun dari anggota Dewan, terletak pada Lembaga Pers yang bertanggungjawab. Tanpa rekan-rekan jurnalis, tanpa surat kabar, tanpa televisi, radio dan media on-line, semua proses politik di DPR tidak akan diketahui masyarakat.

Keseimbangan informasi yang rekan-rekan jurnalis sajikan kepada khalayak adalah bentuk tanggungjawab

tersebut. Karena dalam menjalankan tugasnya, saya yakin jurnalis tetap berpedoman pada etika-etika jurnalistik yaitu melalui *check and re-check* yang *balance* dalam menuangkan hasil liputannya.

Rekan-rekan jurnalis yang saya banggakan,

Pada kesempatan ajang silaturahmi ini, saya mengucapkan terimakasih atas peran rekan-rekan wartawan dalam membantu mensosialisasikan proses politik di Senayan. Sebagai pimpinan DPR, saya berharap tercipta sinergisitas kerja antara DPR dan Lembaga Pers yang dapat memberikan nilai manfaat bagi bangsa dan negara ini.

Wallahul muwafiq illa aqwamith thariq,

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Jakarta, 12 Desember 2009

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**



H. MARZUKI ALIE